

BAB 1 PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Tujuan pembangunan nasional adalah meningkatkan kinerja perekonomian agar mampu menciptakan lapangan kerja dan kehidupan yang layak bagi seluruh rakyat yang pada gilirannya akan mewujudkan kesejahteraan penduduk Indonesia (Meinny kolibu dkk, 2017). Salah satu sasaran pembangunan nasional adalah menurunkan tingkat kemiskinan. Kemiskinan merupakan hal klasik yang belum tuntas terselesaikan terutama di Negara berkembang, artinya kemiskinan menjadi masalah yang dihadapi dan menjadi perhatian di setiap Negara. Persoalan kemiskinan merupakan salah satu permasalahan pokok yang dihadapi bangsa Indonesia sejak dulu hingga sekarang. Berbagai perencanaan, kebijakan serta program pembangunan yang telah dan akan dilaksanakan pada intinya adalah untuk mengurangi jumlah penduduk miskin. Permasalahan kemiskinan merupakan permasalahan yang kompleks dan multidimensional (Rohani,2016 diakses pada tanggal 22 Juli 2020).

Menurut *World Bank* (2004), salah satu sebab kemiskinan adalah kurangnya pendapatan dan aset (*lack of income and assets*) untuk memenuhi kebutuhan dasar seperti makanan, pakaian, perumahan dan tingkat kesehatan dan pendidikan yang dapat diterima (*acceptable*). Di samping itu kemiskinan juga berkaitan dengan keterbatasan lapangan pekerjaan dan biasanya mereka yang di kategorikan miskin (*the poor*) tidak memiliki pekerjaan (pengangguran), serta tingkat pendidikan dan kesehatan mereka pada umumnya tidak memadai. Standar hidup yang rendah di

akibatkan oleh tingkat pendapatan yang sangat rendah dan mengakibatkan tingkat kemiskinan semakin meningkat (Todaro, 2004).

Sejak digiatkan kembali program-program pengentasan kemiskinan tersebut, jumlah penduduk miskin secara perlahan berhasil menurunkan jumlahnya. Badan Pusat Statistik mencatat bahwa persentase penduduk miskin di Indonesia pada 2014 sampai 2019 cenderung menurun setiap tahunnya yakni, 11,25 persen pada tahun 2014 menjadi 11,22 persen di tahun 2015 menjadi 10,86 di tahun 2016 menjadi 10,64 persen di tahun 2017 selanjutnya di tahun 2018 9,82 menurun menjadi 9,41 persen di tahun 2019. Hal ini berarti bahwa presentase penduduk miskin di Indonesia mengalami penurunan ditandai dengan roda perekonomian Indonesia semakin membaik (www.bps.go.id).

menunjukkan tingkat rata-rata kemiskinan di provinsi Nusa Tenggara timur (22 kota/kabupaten) dapat dilihat bahwa Kabupaten Belu masih menghadapi permasalahan kemiskinan. Dalam perbandingan rata-rata tingkat kemiskinan di seluruh kota/kabupaten provinsi Nusa Tenggara Timur tahun 2014-2019. Tabel 1.1 di bawah ini.

Tabel 1.1
Persentase tingkat Kemiskinan di Provinsi Nusa Tenggara Timur
Tahun 2014-2019

No	Kota/kabupaten	2014	2015	2016	2017	2018	2019
1	Sumba Barat	27,79	30,56	29,34	29,28	28,51	28,29
2	Sumba timur	27,63	31,74	31,43	31,03	31,13	30,02
3	Kupang	19,05	23,37	23,43	22,91	23,10	23,03
4	TTS	26,79	31,12	29,89	29,44	28,06	27,87
5	TTU	20,89	25,20	24,07	23,52	22,31	22,45
6	Belu	14,24	16,81	15,82	15,92	15,70	15,54
7	Alor	19,48	22,92	22,35	21,67	21,63	21,59
8	Lembata	22,32	27,13	26,26	25,48	26,45	26,30
9	Flores Timur	7,83	9,66	10,31	10,75	11,05	10,90
10	Sikka	12,27	14,28	14,33	14,20	13,82	13,53
11	Ende	20,37	23,49	23,89	23,95	24,20	23,18
12	Ngada	10,76	12,81	12,69	12,77	12,94	12,48
13	Manggarai	20,22	23,18	22,50	21,91	20,83	20,55
14	Rote Ndao	26,85	30,48	29,60	28,81	28,08	27,95
15	Manggarai Barat	17,20	20,12	19,35	18,86	18,14	18,01
16	Sumba Tengah	31,30	36,22	36,55	36,01	34,85	34,62
17	Sumba Barat Daya	25,78	30,01	30,63	30,13	28,88	28,06
18	Nagekeo	12,02	14,38	13,61	13,48	12,98	12,85
19	Manggarai Timur	24,01	28,62	27,71	26,80	26,50	26,49
20	Sabu Rajua	29,48	33,17	33,24	31,07	30,83	30,52
21	Malaka	-	17,28	16,06	16,52	16,34	16,12
22	Kota Kupang	8,70	10,21	9,97	9,81	9,61	9,22

Sumber; BPS NTT (2020)

Berdasarkan Tabel 1.1 Keberhasilan Kabupaten Belu dalam menanggulangi kemiskinan belum sepenuhnya berhasil. Ini terlihat dari tingkat kemiskinan yang masih relatif tinggi. Berdasarkan Risma Amelia (2012), kondisi sebagian besar alam di Kabupaten Belu tandus dan gersang. Kekeringan dan rawan pangan seolah menjadi rutin yang di hadapi warga Kabupaten Belu dan Kabupaten lain di NTT hampir setiap tahun.

Berbagai upaya pemerintah baik pusat maupun daerah telah berupaya dalam melaksanakan berbagai kebijakan dan program-program pengentasan kemiskinan di NTT namun masih jauh dari induk permasalahan. Kebijakan dan program yang dilaksanakan belum menampakkan hasil yang optimal. Masih terjadi kesenjangan antara rencana dengan pencapaian tujuan karena kebijakan dan program penanggulangan kemiskinan lebih berorientasi pada program sektoral. Oleh karena itu diperlukan strategi penanggulangan kemiskinan yang terpadu, terintegrasi dan sinergi sehingga dapat menyelesaikan masalah secara tuntas karena permasalahan kemiskinan merupakan lingkaran kemiskinan (Wisnu,2011). Kabupaten Belu yang turut menyumbangkan angka kemiskinan cukup besar di Provinsi NTT yang cukup besar. Berdasarkan BPS (2019), bahwa Kabupaten Belu berada pada posisi ke enam belas (16) dari total 22 Kabupaten dan Kota Di NTT. Tercatat bahwa pada tahun 2020 penduduk miskin di Belu sebesar 15,58 persen. Kabupaten Belu dalam menanggulangi kemiskinan belum sepenuhnya berhasil. Ini terlihat dari tingkat kemiskinan yang masih relatif tinggi.

Berdasarkan penelitian Robert Sibuarian (2009), kondisi sebagian besar alam di Kabupaten Belu tandus dan gersang, kekeringan dan rawan pangan seolah

menjadi bencana rutin yang di hadapi warga Kabupaten Belu. Sumber Daya Alam (SDA) yang cukup besar dan beragam yang tersebar di setiap daerah, namun sampai saat ini potensi setiap sektor tersebut belum secara optimal dapat memberikan nilai tambah yang signifikan untuk mensejahterakan rakyat dan daerah Belu. Hal ini disebabkan karena masih kurangnya investasi yang dilakukan. Untuk mengetahui gambaran masalah kemiskinan sebagaimana pemaparan pada uraian diatas maka dapat dilihat persentase angka kemiskinan di Kabupaten Belu pada tabel 1.2 di bawah ini.

Tabel 1.2
Kemiskinan di Kabupaten Belu Tahun 2000-2020

Tahun	Persentase Kemiskinan (%)
2000	23,40
2001	29,53
2002	18,48
2003	20,66
2004	20,51
2005	20,74
2006	20,09
2007	21,02
2008	19,69
2009	17,47
2010	15,48
2011	14,61

Sumber; BPS Belu (2021)

2012	14,52
2013	14,42
2014	14,24
2015	16,81
2016	15,82
2017	15,92
2018	15,70
2019	15,54
2020	15,37

Berdasarkan tabel 1.2 terlihat jelas bahwa penduduk miskin di kabupaten Belu cenderung menurun. Selama periode pengamatan dari tahun 2000 sampai dengan tahun 2020 jumlah penduduk miskin yang terlihat dalam ukuran persentase nilainya cukup fluktuatif. Dari data yang disajikan di atas juga turut menjelaskan bahwa pada tahun 2000 mengalami kenaikan sebesar 23,40 persen dan di tahun 2020 turun menjadi 15,37 persen. Selama kurun waktu dua puluh satu (21) tahun, Pemerintah Daerah Kabupaten Belu mampu menurunkan angka kemiskinan melalui berbagai program penanggulangan kemiskinan namun tidak sepenuhnya berhasil.

Salah satu cara untuk mengurangi angka kemiskinan di Kabupaten Belu adalah menekan angka jumlah penduduk sehingga tidak berdampak pada tingkat kepadatan penduduk di wilayah tersebut. Berdasarkan data BPS kabupaten Belu menunjukkan bahwa selama tahun 2011 hingga tahun 2020 laju pertumbuhan penduduk berkisar antara 1 persen per tahunnya, hanya saja pada tahun 2017 mengalami peningkatan laju pertumbuhan sampai 3 persen pertahun dan

selanjutnya menurun lagi menjadi 1 persen pertahun. Kepadatan penduduk dapat didefinisikan sebagai jumlah orang persatuan luas lahan (per km², per mil) di suatu daerah. Laju pertumbuhan penduduk yang tinggi dapat diakibatkan karena tingginya angka kelahiran di suatu wilayah tersebut. Salah satu implikasinya akan tingginya angka kelahiran adalah banyaknya jumlah anak-anak di wilayah tersebut. Dengan demikian, jumlah angkatan kerja secara otomatis menanggung beban yang lebih banyak untuk menghidupi anak-anak dibawah usia 14 tahun. Penduduk yang berusia lanjut maupun yang masih anak-anak secara ekonomis disebut beban ketergantungan artinya, mereka merupakan anggota masyarakat yang tidak produktif, sehingga menjadi beban angkatan kerja yang produktif (Todaro,2006).

Jumlah penduduk di Kabupaten Belu dari tahun 2000 hingga tahun 2020 mengalami fluktuasi, dimana jumlah penduduk ini sangat dipengaruhi oleh kelahiran, kematian dan perpindahan penduduk dari daerah lain masuk ke kabupaten Belu maupun sebaliknya Untuk mengetahui lebih mendetail tentang jumlah penduduk di Kabupaten Belu maka dapat di lihat pada tabel 1.3 di bawah ini.

Tabel 1.3
Jumlah Penduduk (jiwa)di Kabupaten Belu Tahun 2000-2020

Tahun	Jumlah Penduduk (jiwa)	Laju Pertumbuhan Penduduk
2000	277.137	-
2001	284.074	-
2002	291.967	-
2003	331.385	-

Sumber;BPS Kab. Belu (2021)

2004	324.165	-
2005	361.862	-
2006	371.530	-
2007	378.882	-
2008	384.182	-
2009	245.234	-
2010	189.123	-
2011	192.808	1,95
2012	196.330	1,83
2013	199.990	1,86
2014	204.986	1,65
2015	204.541	1,39
2016	207.170	1,29
2017	213.596	3,10
2018	218.620	1,49
2019	226.039	1,54
2020	217.973	1,39

Berdasarkan tabel 1.3 terlihat jelas bahwa jumlah penduduk di Kabupaten Belu menurun setiap tahunnya. Selama periode pengamatan dari tahun 2000 sampai dengan tahun 2020 jumlah penduduk miskin yang terlihat dalam ukuran persentase nilainya terus menurun. Dari data yang disajikan di atas juga turut menjelaskan bahwa pada tahun 2000 mengalami penurunan sebesar 277.137 jiwa dan di tahun 2020 turun menjadi 217.973 jiwa. Hal ini berarti bahwa jumlah penduduk signifikan menurunkan tingkat kemiskinan, hal ini di karenakan pada tahun 2013 Kabupaten

Belu mekarkan wilayah bagian selatan menjadi Kabupaten Malaka maka secara otomatis jumlah penduduknya menurun selama tujuh tahun terakhir ini. Selain adanya program penggiatan Keluarga Berencana (KB) untuk mengendalikan laju pertumbuhan penduduk Kabupaten Belu. Faktor lain yang juga berpengaruh terhadap tingkat kemiskinan adalah pengangguran. Salah satu unsur yang menentukan kemakmuran suatu masyarakat adalah tingkat pendapatan. Pendapatan masyarakat mencapai maksimum apabila kondisi tingkat penggunaan tenaga kerja penuh (*full employment*) dapat terwujud. Menurut Sadono Sukirno (2000), Pengangguran akan menimbulkan efek mengurangi pendapatan masyarakat, dan itu akan mengurangi tingkat kemakmuran yang telah tercapai. Semakin turunnya tingkat kemakmuran akan menimbulkan masalah lain yaitu kemiskinan.

Tabel 1.4
Persentase Pengangguran di Kabupten Belu
Tahun 2000-2020 (Jiwa)

Tahun	Persentase Pengangguran (%)
2000	1,41
2001	4,61
2002	3,11
2003	3,49
2004	2,64
2005	5,40
2006	3,97
2007	3,13
2008	3,12
2009	3,10

2010	2,67
2011	3,14
2012	2,21
2013	3,91
2014	2,96
2015	5,39
2016	2,31
2017	2,47
2018	5,26
2019	7,19
2020	7,12

Sumber;BPS Kab. Belu (2021)

Berdasarkan tabel 1.4 terlihat bahwa tingkat pengangguran di Kabupaten Belu mengalami fluktuasi pada setiap dan akan cenderung meningkat. Selama periode pengamatan dari tahun 2000 sampai dengan tahun 2020 tingkat pengangguran yang terlihat dalam ukuran persentase nilainya terus meningkat. Dari data yang disajikan di atas juga turut menjelaskan bahwa pada tahun 2000 mengalami penurunan sebesar 1,41 persen dan di tahun 2020 naik menjadi 7,12 persen. Hal ini menunjukkan bahwa pemerintah Kabupaten Belu berhasil menekan tingkat pengangguran namun belum sepenuhnya berhasil. Ini terlihat dari tingkat pengangguran yang masih relatif tinggi. Tingkat pertumbuhan angkatan kerja yang cepat dan pertumbuhan lapangan kerja yang relatif lambat menyebabkan masalah pengangguran yang adadi suatu daerah menjadi semakin serius. Besarnya tingkat pengangguran merupakan cerminan kurang berhasilnya pembangunan di suatu

negara. Pengangguran dapat mempengaruhi kemiskinan dengan berbagai cara (Tambunan, 2001).

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, di Kabupaten Belu 2000-2020 terjadi fenomena penurunan tingkat kemiskinan, tetapi rata-rata tingkat kemiskinannya dibanding Kabupaten Lain di Provinsi Nusa Tenggara Timur adalah paling tinggi. Oleh karena itu penting untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi kemiskinan di Kabupaten Belu. Dalam penelitian ini akan melihat pengaruh variabel jumlah penduduk dan pengangguran terhadap tingkat kemiskinan di Kabupaten Belu

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian di latar belakang tersebut, maka rumusan masalah dalam penelitian inisebagai berikut:

1. Apakah terdapat pengaruh antara jumlah penduduk (X_1) terhadap tingkat kemiskinan (Y) di Kabupaten Belu?
2. Apakah terdapat pengaruh antara pengangguran (X_2) terhadap tingkat kemiskinan (Y) di Kabupaten Belu?
3. Apakah terdapat pengaruh antara jumlah penduduk (X_1) terhadap pengangguran (X_2) di Kabupaten Belu?
4. Apakah terdapat pengaruh antara jumlah penduduk (X_1) dan pengangguran (X_2) terhadap tingkat kemiskinan (Y) di Kabupaten Belu?

1.3 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pengaruh antara jumlah penduduk (X_1) terhadap tingkat kemiskinan (Y) di Kabupaten Belu.
2. Untuk mengetahui pengaruh antara pengangguran (X_2) terhadap tingkat kemiskinan (Y) di Kabupaten Belu.
3. Untuk mengetahui pengaruh antara jumlah penduduk (X_1) terhadap pengangguran (X_2) di Kabupaten Belu.
4. Untuk mengetahui pengaruh antara jumlah penduduk (X_1) dan pengangguran (X_2) terhadap tingkat kemiskinan (Y) di Kabupaten Belu.

1.4 Kegunaan Penelitian

Manfaat penelitian ini sebagai berikut:

1. Bagi penulis, sebagai media pengembangan ilmu pengetahuan dalam upaya peningkatan kualitas intelektualitas.
2. Bagi pemerintah Kabupaten Belu, penelitian ini diharapkan mampu memberikan informasi yang berguna di dalam memahami pengaruh jumlah penduduk, pengangguran terhadap tingkat kemiskinan, sehingga dapat ditemukan sebuah solusi pengentasan kemiskinan dimasa yang akan datang.
3. Sebagai bahan referensi bagi semua pihak untuk mengadakan penelitian dengan topik yang sama.